BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan lansia dhuafa di Kelurahan Tambora memiliki struktur yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Pemberdayaan ini dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan dan bantuan sosial, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dhuafa. Koordinasi antara pemerintah daerah, kelurahan, RT/RW, dan masyarakat telah berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan di lapangan. Koordinasi di tingkat bawah dan akses informasi bagi masyarakat lansia masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa warga lansia merasa kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai program pemberdayaan yang ada. Selain itu, ketidakpastian mengenai kontinuitas dan pemerataan bantuan, seperti bantuan beras dan kartu lansia, juga menjadi masalah yang perlu diperbaiki.

Upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik melalui transparansi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi bantuan sosial. Meskipun begitu, ada beberapa keluhan mengenai pemerataan bantuan dan masih adanya kekurangan dalam distribusi bantuan yang adil dan merata. Partisipasi pegawai pemerintah *(employee involvement)* dan stakeholder dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan lansia dhuafa sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan sosial ini. Keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah, Dinas Sosial, kelurahan, dan masyarakat, akan meningkatkan efektivitas program dan memperbaiki kesejahteraan lansia dhuafa.

5.2 Saran

1. Peningkatan Koordinasi dan Sosialisasi: Perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih baik di antara pihak-pihak terkait, terutama di tingkat kelurahan dan RT/RW, agar informasi mengenai program pemberdayaan lebih mudah diakses oleh masyarakat lansia. Sosialisasi

yang lebih aktif dan terstruktur akan membantu mengurangi kebingungan mengenai pendaftaran dan pengambilan bantuan.

2. Transparansi dan Pemerataan Bantuan: Walaupun sistem bantuan sudah terstruktur, masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan. Pemerintah kelurahan perlu lebih memperhatikan distribusi bantuan secara adil, termasuk dalam memberikan bantuan modal usaha bagi lansia yang ingin berwirausaha. Sistem penggiliran dapat dipertimbangkan, tetapi lebih baik bila ada kebijakan yang menjamin distribusi bantuan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Peningkatan Akses terhadap Bantuan Modal Usaha: Beberapa lansia yang memiliki usaha kecil mengungkapkan kebutuhan untuk mendapatkan bantuan modal usaha agar tetap dapat mandiri secara ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian bantuan modal usaha yang lebih terstruktur bagi lansia yang mampu dan ingin menjalankan usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka.

4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah: Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi bantuan harus terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dalam distribusi bantuan berlandaskan pada data yang valid dan tepat sasaran, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.